



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 336 TAHUN 2023  
TENTANG  
RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK  
KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE KEDUA MENURUT  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE KEDUA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah).

- KEDUA : Rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2023

MENTERI KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 336 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN  
 BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM  
 RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN  
 ANGGARAN 2023 PERIODE KEDUA MENURUT  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK  
 KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI  
 DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE KEDUA MENURUT  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Aceh Barat	10.043.119
2.	Kota Sabang	9.418.662
3.	Kab. Pidie Jaya	12.076.058
4.	Kota Subulussalam	12.045.062
5.	Kota Gunungsitoli	9.753.325
6.	Provinsi Sumatera Barat	8.621.025
7.	Kota Dumai	9.265.433
8.	Kab. Sarolangun	9.289.277
9.	Kab. OKU Timur	9.289.585
10.	Provinsi DKI Jakarta	10.171.644
11.	Kab. Garut	9.366.743
12.	Kab. Temanggung	11.603.391
13.	Kab. Magetan	10.155.620
14.	Kab. Malang	9.370.272
15.	Kab. Trenggalek	9.296.637
16.	Kab. Melawi	11.022.448
17.	Kab. Tabalong	9.290.795
18.	Kota Banjarbaru	9.374.904
19.	Kab. Kutai Kartanegara	9.864.642
20.	Kab. Kutai Timur	9.306.588
21.	Provinsi Sulawesi Tengah	11.207.331
22.	Kab. Banggai	10.287.017
23.	Kab. Morowali	9.436.906
24.	Kab. Tojo Una Una	9.300.511
25.	Kab. Enrekang	9.649.018
26.	Kab. Wajo	10.533.484

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
27.	Kab. Kolaka	9.656.101
28.	Kab. Konawe Selatan	9.383.684
29.	Kab. Kolaka Utara	10.384.348
30.	Kab. Konawe Utara	9.769.785
31.	Kab. Sumbawa	11.447.687
32.	Kota Tidore Kepulauan	10.142.614
33.	Kab. Mamuju	10.176.284
JUMLAH PROVINSI		30.000.000
JUMLAH KABUPATEN/KOTA		300.000.000
JUMLAH NASIONAL		330.000.000

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI